

## ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP KUALITI HIDUP KOMUNITI NELAYAN PESISIRGUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN

**(Studi Dalam Pengelolaan Pariwisata Model Community Based Tourism (CBM))**

1). **Nurbaiti Usman**

2). **Endri Sanopaka**

3). **Raja Abumanshur Matridi**

4). **Desmayeti Arfa**

5). **Sahona**

1), 5) **Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji**

2), 3) **Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji**

4). **Sosiologi STISIPOL Raja Haji**

**Email: [sahons09@gmail.com](mailto:sahons09@gmail.com)**

### *Abstract*

*Community based tourism (CBT) is a concept of tourism management that is closely related to the active participation of communities in tourism development. targets the active roles of communities*

*This form of CBT tourism is organized and owned by communities for the community to help tourists to increase their awareness and learn about local communities and life ordinances. The purpose of this study is basically to know how the management and the role of the village government in CBT management in the village of Gunung Kijang Sub-district persecutor Bintan Regency. In this study, the informants consisted of 5 POKDARWIS managers and 2 villager representative. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive method with a sampling technique.*

*The results of the study concluded that the management of community-based tourism or CBT in Gunung Kijang Vil District, Bintan Regency has not been maximized because there are still many things that need to be improved. The suggestions given so that Community-Based Tourism in Gunung Kijang Village runs well are increasing the function of BUMDes by paying attention to all POKDARWIS, improving facilities, conducting regular tourism management training, the need for intensive promotions and in hearings activities must include discussion of CBT tourism evaluation.*

**Keywords:** Role, village government, Tourism management, Community, CBT

### *Abstrak*

*Community Based Tourism (CBT) adalah sebuah konsep pengelolaan Pariwisata yang berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pariwisatanya yang menitik beratkan pada peran aktif komunitas. Bentuk pariwisata CBT ini di kelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat guna membantu para wisatawan agar meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara kehidupan masyarakat lokal.*

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam pengelolaan CBT di Pesisir Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Dalam penelitian ini informanya terdiri 5 orang pengelola POKDARWIS dan 2 orang Pihak desa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat atau CBT di Gunung Kijang Kabupaten Bintan belum maksimal karena masih ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Adapun saran yang diberikan agar Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Pengudang berjalan dengan baik adalah peningkatan Fungsi BUMDes dengan memperhatikan semua POKDARWIS, meningkatkan fasilitas, melakukan pelatihan pengelolaan pariwisata secara berkala, perlu adanya promosi yang gencar dan dalam kegiatan rapat dengar pendapat harus menyertakan pembahasan mengenai evaluasi pariwisata CBT.

**Kata Kunci :** *peran, pemerintah desa, pengelolaan Pariwisata, Masyarakat, CBT*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Bintan memiliki banyak potensi pariwisata dari sumber daya alam, hingga seni dan budaya yang mana sejak awal Bintan sudah di proyeksikan sebagai pulau tempat wisata dan peristirahatan para turis. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur Daerah dan mengelola kekayaan daerahnya seperti saat ini. Pengaturan hak ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Pasal 2 ayat 4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tersebut "Kebudayaan dan Pariwisata" merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota.

Dalam pengembangan Pariwisata Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memajukan kepariwisataan seperti mengidentifikasi dan mengali potensi objek objek daya tarik wisata, Pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata terus dilakukan, serta pengembangan sarana dan prasarana pariwisata juga terus ditingkatkan dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah serta pemerintah desa dan juga masyarakat harus mampu untuk mengidentifikasi potensi yang telah dimiliki oleh Desa. Tujuannya agar mampu menjadi penyokong perekonomian desa, meningkatkan pendapatan desa secara otomatis juga akan

meningkatkan pendapatan Desa yang mana secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pada pengelolaan Pariwisata Desa mempunyai peran dalam Pengelolaan terhadap objek pariwisata yang ada di daerahnya, Desa yang juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang memiliki peran yang sangat strategis dalam pengaturan masyarakat Desa dan keberhasilan Pembangunan Nasional. Dalam Pembangunan Parisiwisata harus sesuai dan harus memperhatikan adat istiadat yang ada pada masyarakat, selain itu juga ciri khas masyarakat lokal juga harus tetap dijaga sebagai suatu ciri dan keistimewaan yang dimilik dari masing - masing Desa.

Kegiatan pariwisata akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan baik secara langsung, berangsur-angsur maupun masa yang akan datang begitupun kondisi Sosial dan Adat istiadat masyarakat. Dari hal ini tentunya dalam pembangunan pariwisata harus menggunakan konsep yang mana memperhatikan hal-hal tersebut, salah satunya yaitu dengan konsep yang Berbasis Masyarakat.

Dari uraian diatas maka diperlukan analisis pengkajian lebih lanjut mengenai pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana masyarakat mengelola langsung mulai dari perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Dan bagaimana keterlibatan Pemerintah Desa dalam pengelolan Pariwisata berbasis Masyarakat di Pesisir Gunung Kijang Kabupaten Bintan, maka peneliti merasa perlu melakukan Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Model *Community Based Tourism (CBT)* Di Pesisir Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam pengelolaan CBT di pesisir Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Peran Pemerintah Desa

Subandi (2007) menjelaskan Peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata alam merupakan bagian integral pemberdayaan kapasitas institusional. Pengembangan objek wisata yang dilakukan pemerintah desa meliputi tindakan pemerintah Desa

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk melalui wilayah melalui eksplorasi asset yang dimiliki desa.

Menurut Suhardono (1994) dalam jurnal Hendrik (2013) Peran merupakan sebuah patokan yang membatasi apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sedang menduduki satu jabatan. Pada peran kepala desa yaitu, meliputi :

- a. Motivasi, adalah suatu dorongan, rangsangan, dan pengaruh yang diberikan oleh seorang individu kepada individu lainnya, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut akan menuruti dan melaksanakan apa yang telah dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.
- b. Fasilitator, adalah orang yang memberikan bantuan seperti fasilitas dan finansial guna mempelancar proses kegiatan pada sekelompok orang sehingga bisa memahami, dan memecahkan masalah bersama-sama.
- c. Mobilitator, merupakan satu kegiatan mengarahkan atau mengerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan bersama.

### **Pengelolaan**

Dalam jurnal Kadji (2018) kata "Pengelolaan" dapat di artikan dengan manajemen, yang bermaksud suatu pengaturan atau pengurusan Suharsimi Arikunto, (2000). Menurut Susarmini Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

### **Pariwisata**

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang dipandang sebagai satu sistem yang besar, yang memiliki beberapa komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya.

Dalam jurnal Sudana (2013) menjelaskan bahwa dalam sistem pariwisata ada banyak aktor yang berperan untuk mengerakan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan yang di kelompokan menjadi tiga pilar utama, yaitu ; (1) Masyarakat, (2) Swasta, dan (3) Pemerintah. masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang berada di

destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Dimasukkan kedalam masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM dan media massa. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, dan sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten dan seterusnya.

### **Pariwisata Model *Community Based tourism* (CBT)**

Dalam jurnal Prakoso & lima (2019) weaver menjelaskan bahwa Pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT) pada awal 1980 adalah suatu *sine qua non* yang berarti mengacu pada suatu (atau ciri) yang sangat diperlukan atau niscaya, yang harus di miliki suatu hal atau ide untuk menjadi apa adanya, dari pariwisata alternatif.

Dalam Elfianita (2016) Rara Sugiarti menyatakan *Community Based Tourism* (CBT) merupakan kegiatan pariwisata yang berbasis komunitas, yang mana masyarakat memiliki hak wewenang juga penentu terhadap berbagai aspek dalam pembangunan pariwisata yang ada. Pada konsep ini posisi masyarakat sebagai pemilik wewenang dan penentu, juga keterlibatan masyarakat mulai dari awal proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Masyarakat berhak menolak jika ternyata dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian dilakukan di Pesisir Gunung Kijang Bintan. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah, karena didasarkan pada observasi lapangan bahwa Desa tersebut memiliki potensi Pariwisata yang mendukung untuk di kelola dengan konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat meningkat kualiti hidup komunitas nelayan pesisir Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Pada subjek penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

Subjek yang diambil pada penelitian ini adalah informan yang dianggap lebih mengetahui dan memahami tentang pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Pesisir Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan pada bagian analisis penulis mengambil dari variabel peran pemerintah desa yang penulis bagi menjadi beberapa dimensi dan indikator yang sudah ditentukan yang menjadi bahan pertanyaan dalam wawancara peneliti dengan intorman dan analisis dari peneliti.

### **1. Analisis Peran Pemerintah Desa Terhadap Kualiti Hidup Nelayan Pesisir di Gunung Kijang Kabupaten Bintan (Dalam Pengelolaan Pariwisata Model *Community Based Tourism (CBT)*)**

Di Desa Pengudang wisata berbasis masyarakat dikembangkan oleh kelompok masyarakat sadar wisata (POKDARWIS) yang dibentuk sejak tahun 2017. Ada lima POKDARWIS yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, adapun lima kelompok POKDARWIS yang ada di Pesisir Gunung Kijang yaitu POKDARWIS Pengudang Mangrove yang di ketuai oleh bapak IW yang beranggotakan 5 orang pengurus, POKDARWIS Kuliner diketuai oleh ibu RM dengan anggota sebanyak 10 orang, POKDARWIS Bamboo Craft diketuai oleh KKB beranggotakan 7 orang, POKDARWIS Kerajinan Kerang di ketuai oleh ibu RH dengan 15 anggota dan POKDARWIS Batumpang di ketuai oleh bapak ZK beranggotakan 10 orang, murni masyarakat Nelayan setempat, tanpa ada anggota perangkat desa yang terlibat.

Dalam pengelolaan POKDARWIS di desa Pengudang ini alokasi anggaran murni berasal dari masyarakat, setiap POKDARWIS memiliki anggaran yang berbeda kisaran 10 juta sampai dengan 90 juta setiap POKDARWIS.

#### **a. Perencanaan, Pelaksanaan Program-Program dan Evaluasi Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat**

### i. Perencanaan

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dapat di simpulkan bahwa pembentukan awal POKDARWIS memang murni di bentuk oleh masyarakat yang kebetulan memang sedari awal sudah bekecimpungan pada bidangnya masing-masing, karena ada beberapa faktor yang mengharuskan kegiatan pariwisata akan berjalan jika berkelompok, seperti pelatihan pemberdayaan maka ketua pengelola membentuk kelompok dengan memilih tetangga dekatnya.

Sejauh ini dalam pengelola belum semua POKDARWIS memiliki rencana pengelolaan yang bersifat terseruktur hanya satu yang memiliki perencanaan yaitu pariwisata Hutan Mangrove. Kelompok POKDARWIS Mangrove Pengudang sudah melakukan perencanaan terbukti dengan sudah menjadikan beberapa rumah warga sebagai homestay, untuk program selanjutnya yaitu menambah menjadi 10 homestay.

### ii. Pelaksanaan program-program

Dalam pelaksanaan program yang dilakukan pengelola pelaksanaan program-program POKDARWIS Desa Pengudang belum maksimal di jalankan oleh pengelola hal ini di sebabkan karena diskusi hanya dengan internal kelompok saja.

Saat ini kegiatan yang di lakukan POKDARWIS adalah menjalankan program-programnya yang sudah ada, untuk kelompok Pokdarwis kuliner melanjutkan pembuatan kerupuk yang akan diantar ke kedai-kedai kecil di desa Pengudang. Sementara Pokdarwis bamboo dan Kerajinan kerang produk yang di hasilkan seperti sedotan bamboo, napkin dan kerajinan-kerajinan Dalam waktu dekat untuk saat ini tidak di produksi karena stok masih banyak yang belum terjual. Dan untuk pokdarwis Batu empang dan pengudang mangrove sudah menyediakan pondopo dan homestay, homestay ini adalah rumah warga yang di fungsikan sebagai penginapan. Dan juga membuat basewisata desa yang mengeksplorasi potensi desa seperti mangrove, padang lamun, coral, dan kenekaragam biota laut, juga conceren di pemberdayaan lingkungan serta masyarakat yang bersinergi dengan kelompok-kelompok UMKM lainnya.

Yang menyebabkan hal ini terjadi adalah tidak tereksposenya produk itu sendiri, selain karena lokasi produksinya jauh dari jangkauan dan tidak ada di pajang-pajang di area wisata sehingga wisatawan dari luar tidak tau kalau di Gunung Kijang dan Desa Pengudang memiliki Kerajinan yang bisa dijadikan ole-ole dan tidak adanya pemasaran secara optimal baik dari pemerintah, pengelola maupun masyarakat, sehingga pengelola kebingungan mau dibawa kemana arah POKDAWIS masing-masing.

### **iii. Evaluasi dalam Pengelolaan**

bahwa pada saat ini pengevaluasi belum merata dilakukan, baik sesama anggota pengelola, bersama Desa, Dalam pengevaluasian untuk sesama anggota tidak dilakukan karena kelompok hanya menjalankan program yang sudah ada, namun tidak ada strategi kebijakan seperti proyek, program-program menarik baru, prosedur metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai hasil dari perencanaan.

## **b. Motivasi dari Pemerintah Desa**

### **i. Memberdayakan masyarakat dan kemasyarakatan**

bahwa untuk motivasi dari Desa memang sudah ada dukungan-dukungan melalui kegiatan sosialisasi maupun pelatihan akan tetapi motivasi saat ini hanya berfokus pada wisata-wisata Alamnya saja, sementara untuk pariwsata seperti Kuliner dan Kerajinan belum ada motivasi yang bersifat kegiatan, seperti pelatihan maupun pemberdayaan guna untuk meningkatkan ide-ide kreatif pengelola POKDARWIS belum ada dilaksanakan.

### **ii. Keterlibatan pihak desa dalam perencanaan**

Dalam perencanaan dari desa tidak ada ikut melakukan perencanaan awal dalam pengelolaan pariwsata desa wisata, akan tetapi desa ikut mengembangkan pariwsata yang sudah di jalankan oleh masyarakat. Yaitu ikut melakukan promosi wisata desa. Bahwasanya desa pengudang ini mempunyai mangrove yang indah dan banyak wisata awam yang perlu diketahui, pemerintah desa melakukan promosi ini dengan menggunakan platform media.

Dalam mengembangkan pemerintah desa juga melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk memperluas jaringan, pihak yang terkait adalah PBC (Politeknik Bintan Cakrawala) dan universita Brawijaya yaitu kerja sama dengan melakukan kegiatan Penelitian tentang pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan Potensi desa wisata dan penguatan kelembagaan desa.

#### c. Fasilitas dari Desa

##### i. Memberi bantuan dan menyediakan fasilitas

Tidak semua POKDARWIS yang menerima bantuan berupa finansial ataupun fasilitas, terbukti dengan masih banyaknya kekurangan yang harus dilengkapi oleh para pengelola. Dari lima pengelola hanya satu yang mendapat bantuan yaitu POKDARWIS pengudang Mangrove.

Tidak meratanya bantuan ke seluruh POKDARWIS adalah karena kurang percayanya akan keberhasilan pariwisata pemerintah Desa kepada para pengelola, sementara satu POKDARWIS yang mendapat bantuan yaitu POKDARWIS pengudang mangrove, karena POKDARWIS pengudang mangrove berhasil membuktikan akan keberhasilan Dalam pengelolaan pariwiata hutan mangrove ini, yaitu keberhasilan mengajukan Desa Pengudang menjadi Role Mode Desa Wisata. Progress yang dilakukan mendapat sambutan dari politeknik Bintan Cakrawaka yang akan mendampingi Dalam pengembangan pariwsata berbasis masyarakat. Sehingga akhirnya pihak desa ikut menkontribusikan bantuan yaitu bantuan boat untuk tour wisata Mangrove.

##### ii. Ikut menyelesaikan permasalahan

Tidak ada peran pemerintah Desa dalam penyelesaian masalah.Masalah seperti tidak adanya akses pelayanan makanan dan minuman juga toko cendra mata. Penyebab tidak adanya peran pemerintah Desa dalam penyelesaian masalah karena tidak adanya evaluasi dalam pengelolaan, sehingga pihak Desa tidak mengetahui apa permasalahan yang dialami para pengelola POKDARWIS.

#### d. Mobilitator Pemerintah Desa

##### i. Cara Kepala Desa Mengerakan

Adapun dorongan dari pemerintah desa saat ini pihak Desa sudah mengeluarkan SK Kelompok POKDARWIS ada berupa diskusi yang dilakukan terkait pengelolaan Kuliner, atraksi dan prakarya.Kegiatan ini tidak menghasilkan trobosan atau jalan keluar dari masalah, karena dalam diskusi yang dilakukan hanya pihak internal saja tidak ikut menyertakan orang-orang yang professional dalam hal yang terkait.Namun hal ini belum maksimal karena terbukti yang merasakan kemajuan dari Wisata hanyalah Pengudang Mangrove.

## **ii. Peraturan Desa Tentang Pariwisata**

Dalam pengelolaan pariwisata desa pengudang menuju desa wisata tidak ada peraturan yang dibuat oleh desa.Yang menyebabkan tidak adanya anggaran khusus pariwisata adalah belum adanya Perdes yang mengatur tentang pariwisata itu sendiri.

## **2. Langkah Kebijakan dalam Pengelolaan Pariwisata Community Based Tourism (CBT) di Desa Pengudang**

- a. Peningkatan fungsi BUMDes dengan memperhatikan semua POKDARWIS bersifat pemberian modal
- b. Meningkatkan program akses disetiap objek wisata
- c. Pelatihan secara terus-menerus soal Pariwisata
- d. Perlu adanya program promosi yang gencar
- e. Koordinasi dan konsolidasi, melalui konsolidasi secara informal yang dilakukan secara intensif, konteks ini kemudian dimobilisasi secara terus menerus dengan memperkuat jaringan antara pihak Desa, warga, pengelola pariwisata dan komunitas kepemudaan di tingkat Desa untuk bersama-sama menyamakan prespektif.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam perencanaan awal pengelolaan Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Pengudang semua POKDARWIS membentuk secara spontan tidak adanya perencanaan awal yang secara terstruktur. Untuk pelaksanaan program-program empat dari lima POKDARWIS memiliki program akan tetapi program yang ada tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan, karena pengelola sendiri kebingungan bagaimana mengelola program yang mereka buat karena tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah bagaimana cara mengelola Pariwisata. Sehingga terdapat kendala seperti pemasaran dan permodalan. Hanya satu POKDARWIS yang bisa dikatakan programnya berjalan dengan baik yaitu POKDARWIS Mangrove Pengudang akan tetapi masih juga ada kendala dalam finansial untuk penambahan aset seperti pembangunan homestay. Sememtara untuk evaluasi pengelolaan pariwisata sama sekali tidak dilakukan evaluasi sehingga tidak bisa di simpulkan keberhasilan pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Pengudang.

Pemerintah Desa sebagai perpanjang tangan Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat besar dalam pengaturan, pembangunan dan perkembangan Desa.Untuk itu demi perkembangan dalam pengelolaan Pariwisata peran desa adalah memotivasi memberi fasilitas dan mengerakkan masyarakat.

Dalam memotivasi Pemerintah Desa Pengudang tidak memberikan motivasi secara menyeluruh ke setiap POKDARWIS.Dari kelima pengelola hanya satu POKDARWIS yang mengakui bahwa adanya motivasi berupa sosialisasi dan pelatihan yang di buat oleh desa.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa di harapkan membuat peraturan Desa tentang pariwisata

2. Untuk pemerintah desa agar memperhatikan semua POKDARWIS dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang Dalam pengelolaan POKDARWIS.
3. Pemerintah harus melakukan Pemberdayaan dalam pengelolaan pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Pengudang, yang mana pemberdayaan berupa Pelatihan secara berkelanjutan kepada POKDARWIS-POKDARWIS. Yang mengikut sertakan seseorang yang professional dalam hal Pengelolaan Pariwisata.
4. Pemerintah Desa diharapkan menambahkan dalam penyediaan fasilitas umum dan akses jual makanan dan minuman.Dan menyediakan kendaraan khusus Pariwisata seperti Bus Pariwisata untuk pelaku pariwisata dari luar daerah mengakses perjalanan ke Pesisir Gunung Kijang dan Desa Pengudang.
5. promosi secara gencar di sosial media secara resmi. Yaitu dengan membuat satu web khusus PariwisataPesisir Gunung Kijang dan Desa Pengudang yang seluruh kegiatan yang berhubungan dengan seluruh informasi pariwisata desa pengudang bisa diketahui dengan satu kali akses.
6. Dalam rapat dengar pendapat di harapkan pihak desa pihak Desa para pengelola maupun masyarakat harus menyertakan pembahasan evaluasi mengenai keberlanjutan pembangunan Desa wisata.
7. Apabila perusahaan BMW sudah mulai melakukan pengembangan Pariwisata diharapkan kerjasama dalam pengelolaanya menerapkan konsep CBT.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:Rhinexa Cipta.

Elfianita Elina. 2016. “*Pengembangan Pariwiata Berbasis CBT*” Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah - S1 Vol.5 No.3

Hendrik, Okta. 2013 “*Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelengaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau*” Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 No.2

Kadji Jurisman. 2018. “*Optimalisasi Tata Kelola Sektor Pariwisata di Kabupaten Gorontalo*” Ad'mistrare Vol.2 No.1

Prakoso Adithia Agung, Lima Yohana Aprilie De. 2019 “*Strategi Pengembangan Pariwisata Kreatif Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)*”. Jurnal of tourismn and creativity Vol 3 No.2

Subandi.2007. *Sistem Ekonomi Indonesia*.Bandung : Alfabeta

Sudana I Putu. 2013. *Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologi Di Wisata Di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan*” Jurnal Analisis Pariwisata Vol.13 No.1